

MULTIKULTURALISME SEBAGAI WACANA KRITIKAL: ANTARA REALITAS SOSIAL DAN IDEAL FILOSOFIS

Tirta Alim Wiliam Diaz, Ita Nofriana, Ersu Melindi Qipti, Kharisma Aprini

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
alimtirta277@gmail.com; itanovriana339@gmail.com
ersamelin@gmail.com; kharismaapriani03@gmail.com

Abstract

Multiculturalism is a philosophical and social concept that emphasizes the recognition of cultural diversity, advocating for principles of justice, equality, and respect for differing cultural identities. While the ideal of multiculturalism is widely accepted in theory, its application in social practice often faces significant challenges, such as social inequality, discrimination, and inter-cultural tensions. This study examines the relationship between the philosophical ideal of multiculturalism and the social realities faced by contemporary multicultural societies. It argues that the gap between theoretical frameworks and real-world practices can be bridged through critical dialogue, a commitment to inclusive policies, multicultural education, and the active role of media in fostering inter-cultural understanding. The research also underscores the importance of collective awareness within society regarding diversity as a vital social resource for promoting social cohesion and justice. By analyzing these dimensions, the study demonstrates how multiculturalism, when effectively implemented, can transcend its theoretical aspirations and become a transformative force in creating just and harmonious societies. Overall, this research aims to provide insights into how societies can bridge cultural differences, not only through policies but by fostering mutual respect and shared values in everyday life.

Keywords: *multiculturalism; cultural diversity; social justice; intercultural dialogue; inclusive policies*

I. PENDAHULUAN

Multikulturalisme telah menjadi salah satu topik utama dalam diskursus sosial, politik, dan filsafat kontemporer. Kehadiran konsep ini tidak hanya merefleksikan realitas keberagaman budaya yang ada di berbagai belahan dunia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai cara mengelola keberagaman tersebut dalam kerangka keadilan sosial dan harmoni. Dalam praktiknya, multikulturalisme kerap dipahami sebagai seperangkat kebijakan untuk mengakomodasi perbedaan budaya. Namun, pendekatan ini sering kali tidak

disertai dengan kajian kritis yang mempertanyakan dasar-dasar filosofis dari konsep tersebut (Kewuel et al., 2017). Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengajukan pertanyaan mendasar: mengapa keberagaman dianggap penting, dan bagaimana multikulturalisme dapat menjembatani kesenjangan antara identitas budaya yang beragam dan tuntutan universalitas dalam masyarakat modern?

Realitas sosial menunjukkan bahwa keberagaman budaya merupakan fenomena yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, keberagaman dapat menjadi sumber kekayaan intelektual, kreativitas, dan inovasi sosial. Namun di sisi lain, keberagaman juga berpotensi menjadi sumber konflik, segregasi, dan marginalisasi. Sejarah mencatat bahwa konflik berbasis budaya atau agama sering kali dipicu oleh kegagalan dalam memahami dan mengakomodasi perbedaan. Dalam konteks ini, multikulturalisme muncul sebagai respons normatif terhadap tantangan-tantangan tersebut, dengan menawarkan kerangka kerja untuk menghormati, melindungi, dan memfasilitasi keberadaan identitas budaya dalam suatu masyarakat (Susanti et al., 2019).

Meskipun demikian, multikulturalisme sebagai realitas sosial tidak jarang bertentangan dengan ideal filosofisnya. Di tingkat implementasi, kebijakan multikulturalisme di berbagai negara sering kali menghadapi paradoks yang sulit dihindari. Perlindungan terhadap minoritas budaya, misalnya, terkadang justru menghasilkan segregasi sosial atau menimbulkan kecemburuan di kalangan mayoritas. Dalam beberapa kasus, multikulturalisme bahkan dianggap gagal karena tidak mampu menyentuh akar permasalahan berupa ketimpangan struktural yang membentuk relasi antarbudaya (Ambarudin, 2016). Konsep multikulturalisme tidak hanya sebagai kebijakan praktis, tetapi juga sebagai sebuah wacana kritis yang terus-menerus harus ditafsirkan ulang dalam kerangka filosofis.

Dari perspektif filsafat, multikulturalisme tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas keberagaman, tetapi juga dengan isu-isu keadilan, pengakuan identitas, dan etika kehidupan bersama. Pemikiran para filsuf seperti Charles Taylor dan Will Kymlicka menjadi penting dalam konteks ini. Keduanya menekankan bahwa pengakuan terhadap identitas budaya merupakan syarat esensial bagi terciptanya keadilan sosial. Mereka berargumen bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tidak hanya memberi ruang bagi keberagaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap identitas budaya dapat berkembang secara setara dalam ruang publik (Dulmanan, 2020). Dalam kerangka ini, multikulturalisme dipahami tidak sekadar sebagai kebijakan politik, melainkan sebagai visi filosofis tentang bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa kehilangan identitas individualnya.

Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi multikulturalisme sebagai wacana kritis dengan menyoroti dua dimensi utama, yakni realitas sosial dan ideal filosofis. Dimensi realitas sosial mengungkapkan

tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat multikultural dalam kehidupan sehari-hari, sementara dimensi ideal filosofis memberikan arah dan kerangka normatif bagi pengembangan masyarakat yang inklusif dan adil. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana multikulturalisme dapat melampaui slogan politik dan benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang efektif.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perdebatan tentang multikulturalisme, terutama dalam menjembatani kesenjangan antara kenyataan sosial dan ideal yang diinginkan, serta menawarkan perspektif baru yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Multikulturalisme Sebagai Realitas Sosial

Multikulturalisme sebagai realitas sosial bukan hanya menggambarkan adanya keragaman budaya dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan suatu proses dinamis di mana berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya saling berinteraksi, bernegosiasi, serta membentuk struktur sosial yang saling mempengaruhi. Keberagaman ini merupakan suatu keniscayaan dalam dunia global yang semakin terhubung, di mana mobilitas manusia, pertukaran budaya, dan interaksi lintas negara terjadi secara intensif. Dalam konteks tersebut, keberagaman bukan lagi pilihan, melainkan kondisi sosial yang harus dihadapi sebagai tantangan sekaligus peluang (Harmi, 2020). Realitas ini membentuk lanskap sosial yang kompleks, di mana identitas individu dan kelompok kerap kali terbentuk dan dipertanyakan dalam interaksinya dengan identitas-identitas lain yang ada.

Di satu sisi, multikulturalisme membuka peluang bagi ekspresi budaya yang beragam dalam ruang publik. Negara-negara yang mengadopsi kebijakan multikulturalisme pada umumnya bertujuan memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk mempertahankan dan merayakan identitas budayanya. Ini mencakup aspek-aspek seperti bahasa, adat istiadat, praktik keagamaan, dan nilai-nilai sosial. Dalam kerangka ini, multikulturalisme menjadi bentuk pengakuan terhadap hak-hak budaya serta hak individu untuk tetap mempertahankan keunikan identitas mereka. Beberapa negara seperti Kanada, Australia, dan sejumlah negara di Eropa telah menerapkan kebijakan multikulturalisme sebagai dasar bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman (Ramedlon et al., 2021).

Namun demikian, di sisi lain, realitas sosial multikulturalisme sering kali disertai dengan munculnya ketegangan dan konflik. Keberagaman tidak selalu membawa dampak positif, terutama jika tidak ada mekanisme yang adil dan inklusif untuk mengelola perbedaan yang ada. Ketegangan antara kelompok mayoritas dan

minoritas bisa timbul akibat perbedaan nilai dasar, terutama yang berkaitan dengan agama, norma sosial, serta pandangan hidup. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan masyarakat untuk merespons keragaman secara efektif baik melalui kebijakan publik maupun interaksi sosial sehari-hari berujung pada konflik sosial dan ketidaksetaraan (Fatah et al., 2023).

Lebih jauh, multikulturalisme juga dihadapkan pada tantangan yang berkaitan dengan kesenjangan ekonomi dan politik. Kelompok minoritas kerap mengalami marginalisasi, baik dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, maupun partisipasi politik. Ketimpangan ini memperparah ketegangan antarbudaya, karena kelompok minoritas merasa dipinggirkan dan terancam oleh dominasi budaya mayoritas (Setyaningsih, 2021). Ketidaksetaraan tersebut tidak hanya bersifat sosial-ekonomi, tetapi juga berakar pada ketidakadilan struktural yang menghambat terciptanya integrasi sosial yang adil dan setara.

Selain itu, media massa memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi terhadap masyarakat multikultural. Representasi budaya yang disampaikan melalui media sering kali menyederhanakan kompleksitas identitas budaya suatu kelompok, bahkan memperkuat stereotip yang merugikan. Representasi semacam ini berpotensi memperburuk polarisasi dan memperbesar jarak antar kelompok budaya yang berbeda. Oleh karena itu, multikulturalisme tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memaknai dan menanggapi keberagaman yang ada (Putra et al., 2024).

Salah satu tantangan utama dalam masyarakat multikultural adalah bagaimana mengelola perbedaan secara konstruktif, tanpa mengorbankan nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Multikulturalisme menuntut adanya dialog yang terbuka dan pengertian antarkelompok sebagai jalan menuju keharmonisan sosial. Hal ini memerlukan upaya untuk menemukan titik temu antara pengakuan terhadap keberagaman budaya dan pencapaian kesatuan sosial yang dapat diterima semua pihak (Sapetra Siburian et al., 2023).

Dalam upaya mewujudkan masyarakat multikultural yang harmonis, pendidikan multikultural menjadi aspek yang sangat krusial. Pendidikan yang menanamkan nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman antarbudaya merupakan landasan untuk mengurangi ketegangan sosial. Tanpa pendidikan yang menyadarkan pentingnya keberagaman, masyarakat akan rentan terhadap prasangka, segregasi sosial, dan konflik antar kelompok. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang inklusif juga diperlukan untuk mendukung integrasi sosial. Kebijakan semacam ini harus tidak hanya melindungi hak-hak kelompok minoritas, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan semua warga negara berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Haryono et al., 2024).

Dengan demikian, multikulturalisme sebagai realitas sosial membawa tantangan besar sekaligus menawarkan peluang yang signifikan. Tantangannya adalah bagaimana mengelola keberagaman tersebut agar menjadi kekuatan yang mendorong solidaritas sosial, penghargaan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial. Sementara itu, peluangnya terletak pada kemampuan untuk membentuk masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang budayanya, dapat hidup dengan martabat serta memiliki akses yang setara terhadap berbagai kesempatan.

2.1.2. Multikulturalisme Sebagai Ideal Filosofis

Multikulturalisme sebagai suatu ideal filosofis tidak sekadar dipahami sebagai kebijakan publik atau model sosial, melainkan sebagai visi normatif mengenai bagaimana masyarakat seharusnya mengelola keberagaman secara adil dan bermartabat. Dalam ideal ini, multikulturalisme bertumpu pada pengakuan terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan individu (Jurnal & Nusantara, 2024). Keberagaman budaya tidak cukup hanya diizinkan untuk eksis, tetapi harus diakui dan dirayakan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan.

Secara filosofis, multikulturalisme berakar pada pemikiran pluralistik yang menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila setiap budaya dan identitas memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. Pemikiran ini secara langsung menantang pandangan monokultural yang cenderung menjadikan satu budaya dominan sebagai tolok ukur bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, multikulturalisme mengedepankan nilai inklusivitas sebagai prinsip dasar, dengan keyakinan bahwa keberagaman budaya bukanlah hambatan bagi persatuan, melainkan sumber kekuatan dan dinamisme sosial (Addainuri et al., 2024).

Kontribusi pemikiran filsuf-filsuf seperti Charles Taylor, Will Kymlicka, dan Michael Walzer sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman tentang multikulturalisme sebagai ideal filosofis. Charles Taylor, dalam karyanya *Multiculturalism and the Politics of Recognition*, menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya dalam masyarakat yang adil. Bagi Taylor, pengakuan ini bukan hanya penting demi kesejahteraan individu, tetapi juga merupakan komponen mendasar dalam pencapaian keadilan sosial. Ketika identitas budaya diabaikan, individu akan merasa tidak dihargai, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan sosial (Taylor, n.d.).

Sementara itu, Will Kymlicka melalui bukunya *Multicultural Citizenship* memperluas gagasan tersebut dengan menekankan pentingnya hak-hak kolektif bagi kelompok minoritas. Menurut Kymlicka, pengakuan budaya harus disertai dengan perlindungan terhadap kebebasan kelompok untuk melestarikan dan

mengembangkan identitas mereka tanpa merasa terancam oleh dominasi budaya mayoritas (Clarke, 1969). Hak-hak tersebut mencakup kebebasan berbahasa, menjalankan praktik keagamaan, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dengan tetap menghargai keunikan budaya masing-masing.

Pemikiran tentang multikulturalisme sebagai bentuk keadilan sosial juga memiliki korelasi dengan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*. Meskipun Rawls tidak secara eksplisit membahas multikulturalisme, pandangannya bahwa keadilan menuntut pengakuan terhadap kebutuhan khusus kelompok tertentu menjadi landasan penting bagi pembentukan masyarakat yang inklusif. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk menciptakan kondisi sosial di mana setiap kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dan perlakuan yang adil (Andra Triyudiana, 2023).

Namun demikian, ideal multikulturalisme juga memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana membangun solidaritas dalam masyarakat yang pluralistik. Salah satu kritik yang sering diajukan terhadap multikulturalisme adalah potensi fragmentasi sosial akibat keberagaman budaya yang ekstrem. Kritik ini menilai bahwa keterpisahan antar kelompok dapat menghambat terbentuknya identitas kolektif yang kohesif. Akan tetapi, dalam kerangka filosofis, multikulturalisme justru berupaya menciptakan ruang publik tempat berlangsungnya dialog dan pertukaran antarbudaya yang konstruktif (Basyir, 2023). Dalam kerangka ini, diperlukan suatu bentuk “etika publik” yang tidak hanya menghormati perbedaan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara dalam membangun nilai-nilai bersama.

Etika publik menjadi unsur penting dalam menjembatani tantangan pluralitas budaya. Etika publik berfungsi sebagai pedoman moral untuk mengatasi perbedaan tanpa harus menyeragamkan identitas. Masyarakat yang multikultural secara ideal dituntut tidak hanya untuk menghargai keberagaman, tetapi juga untuk terlibat dalam proses deliberatif guna menyusun kebijakan sosial yang inklusif dan adil. Proses ini menuntut adanya ruang dialog yang memungkinkan saling mendengarkan dan pemahaman, tanpa adanya paksaan untuk mencapai konsensus yang meniadakan identitas tertentu (Basyir, 2023).

Relevansi multikulturalisme sebagai ideal filosofis tidak terbatas pada masyarakat yang telah lama hidup dalam keragaman budaya, melainkan juga penting bagi masyarakat kontemporer yang tengah mengalami perubahan sosial akibat migrasi dan globalisasi. Di tengah mobilitas manusia yang semakin tinggi, tantangan pengelolaan keberagaman menjadi semakin kompleks (Basyir, 2023). Meski demikian, prinsip-prinsip multikulturalisme tetap menawarkan arah moral dan kebijakan dalam menghadapi perbedaan di tingkat global, dengan menekankan nilai keadilan, pengakuan, dan hak untuk hidup dalam keberagaman.

Tentu saja, tidak semua pihak menyambut multikulturalisme dengan tangan terbuka. Sebagian kritik mengkhawatirkan bahwa pengakuan yang berlebihan terhadap perbedaan budaya dapat mengancam integrasi nasional dan menurunkan solidaritas sosial. Akan tetapi, para pendukung multikulturalisme menjawab bahwa kesatuan sosial tidak mengharuskan homogenitas budaya. Justru, nilai-nilai bersama seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan menjadi dasar yang kuat bagi solidaritas dalam masyarakat yang plural (Kymlicka, 2015).

Dengan demikian, multikulturalisme sebagai ideal filosofis mengundang kita untuk membayangkan dan membentuk suatu dunia di mana keberagaman bukan hanya diterima, tetapi juga dirayakan sebagai sumber kekuatan, inovasi, dan perdamaian. Mewujudkan ideal ini membutuhkan komitmen yang mendalam terhadap prinsip keadilan sosial dan etika publik, serta kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung. Dalam masyarakat global yang semakin terhubung, multikulturalisme bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk menciptakan kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

2.1.3. Jembatan Antara Realitas dan Ideal

Multikulturalisme sebagai sebuah ideal filosofis membawa visi besar tentang masyarakat yang adil, inklusif, dan saling menghormati dalam keberagaman budaya. Visi ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya sebagai fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Namun, dalam kenyataan sosial, sering kali terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara idealisme filosofis multikulturalisme dan praktik sosial yang dijalankan. Multikulturalisme yang diusung sebagai prinsip moral dan sosial tidak selalu diimplementasikan secara konsisten dan adil dalam kehidupan nyata. Di sinilah pentingnya kehadiran “jembatan” yang dapat menghubungkan realitas sosial dengan ideal filosofis tersebut. Jembatan ini tidak hanya berupa kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengelola keberagaman, tetapi juga mencakup proses pemahaman dan transformasi sosial yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat (Vera Dwi Apriliani & Acep, 2023).

Untuk menjembatani kesenjangan antara realitas dan ideal multikulturalisme, langkah awal yang penting adalah memahami bahwa realitas sosial dari masyarakat multikultural bersifat dinamis dan terus berkembang. Keberagaman budaya dalam masyarakat tidak selalu berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan dan keharmonisan sosial yang diidealkan. Dalam banyak kasus, keberagaman justru memunculkan tantangan berupa ketegangan antarbudaya, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial yang memperburuk hubungan antar kelompok (Vera Dwi Apriliani & Acep, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman saja tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya

yang sungguh-sungguh untuk mengatasi hambatan struktural, historis, dan politik yang menghambat terciptanya keadilan sosial.

Kegagalan dalam mengelola keberagaman secara adil dan efektif menunjukkan bahwa prinsip multikulturalisme belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah kebijakan multikulturalisme yang cenderung bersifat simbolik atau parsial, tanpa memberikan ruang yang adil bagi semua kelompok budaya, terutama kelompok minoritas. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas sosial justru mengabaikan hak-hak kolektif kelompok minoritas, sehingga menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan partisipasi sosial (Tuasikal & Safitri, 2024).

Untuk menjawab tantangan ini, pendidikan multikultural dapat memainkan peran strategis sebagai sarana transformasi sosial. Pendidikan multikultural bukan sekadar instrumen untuk menanamkan nilai toleransi, melainkan juga merupakan proses membangun kesadaran kritis tentang pentingnya keadilan sosial, pengakuan, dan penghormatan terhadap perbedaan identitas budaya (Alim & Diaz, 2024). Melalui pendidikan, masyarakat didorong untuk tidak hanya mengenali keberagaman, tetapi juga memahami nilai-nilai bersama yang dapat memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Selain pendidikan, media massa dan media sosial juga memegang peranan penting dalam membentuk wacana publik tentang keberagaman. Sayangnya, media sering kali mereproduksi stereotip dan representasi yang menyederhanakan kelompok-kelompok budaya tertentu, terutama kelompok minoritas. Representasi yang tidak adil ini dapat memperkuat prasangka dan memperburuk relasi sosial antar kelompok. Oleh karena itu, media perlu berperan aktif dalam menyajikan keberagaman secara lebih adil, autentik, dan inklusif, agar tercipta ruang publik yang mendorong pemahaman dan solidaritas lintas budaya (Alim et al., 2024).

Dari sisi kebijakan, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan struktur hukum yang mendukung pelaksanaan multikulturalisme yang inklusif. Kebijakan tersebut harus mencakup perlindungan terhadap hak-hak budaya, bahasa, serta akses yang setara terhadap pendidikan dan ekonomi, sekaligus menindak tegas bentuk diskriminasi dan kebencian berbasis identitas. Dalam hal ini, prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls menjadi relevan, yaitu bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat (Muhamad et al., 2024). Dalam kerangka multikulturalisme, hal ini berarti menciptakan kebijakan yang benar-benar mengangkat derajat kelompok-kelompok yang secara historis termarginalkan.

Namun, dalam upaya menjembatani idealisme dan kenyataan sosial multikulturalisme, perlu juga diakui bahwa keberagaman itu sendiri mengandung

tantangan kompleks. Ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan identitas budaya dan tuntutan untuk berintegrasi dalam masyarakat sering kali menciptakan dilema. Multikulturalisme menghendaki kebebasan bagi setiap kelompok budaya untuk mengekspresikan identitasnya tanpa rasa takut akan diskriminasi atau dominasi budaya tertentu. Namun, dalam kenyataannya, kebebasan tersebut sering terbentur oleh struktur sosial yang tidak seimbang dan oleh konflik-konflik yang menyertai relasi antar kelompok (Susetyo, 2017).

Dalam konteks ini, membangun jembatan antara ideal dan realitas juga berarti membangun ulang cara kita memahami identitas kolektif. Masyarakat multikultural yang ideal bukanlah masyarakat yang memandang keberagaman sebagai sekadar fakta sosial, melainkan sebagai sumber kekuatan yang perlu dipelihara. Identitas nasional tidak harus dibangun atas dasar kesamaan budaya, agama, atau ras, tetapi bisa dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti keadilan, kebebasan, dan solidaritas (Syahid & Mashuri, 2023). Oleh karena itu, membangun masyarakat multikultural sejati bukanlah pekerjaan yang mudah atau instan. Ini membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil untuk terus menerus memperjuangkan keberagaman yang adil dan bermartabat. Harapan untuk mewujudkan multikulturalisme sebagai realitas sosial yang adil memang besar, tetapi tantangan untuk mencapainya pun tidak kalah besar. Upaya kolektif, reflektif, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam proses ini.

2.2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis konsep multikulturalisme dalam kerangka filsafat sosial. Data penelitian dikumpulkan dari literatur primer yang berupa teks-teks utama mengenai multikulturalisme, khususnya karya-karya filosofis klasik dan kontemporer yang membahas isu keberagaman budaya, keadilan sosial, dan pengakuan identitas budaya. Beberapa pemikir utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Charles Taylor (1994), Will Kymlicka (1995), dan Michael Walzer (1997), yang secara mendalam mengembangkan teori-teori tentang multikulturalisme dan pluralisme dalam konteks kehidupan sosial dan politik.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi argumen-argumen filosofis yang mendasari pendekatan multikulturalisme, khususnya dalam konteks sosial dan etika kehidupan bersama. Gagasan Charles Taylor tentang pentingnya pengakuan identitas budaya, konsep keadilan diferensial yang dikemukakan oleh Will Kymlicka, serta pendekatan komunitarianisme dalam karya Michael Walzer menjadi fondasi utama dalam kerangka teoritis penelitian ini.

Selain literatur primer, penelitian ini juga memanfaatkan literatur sekunder berupa artikel ilmiah, buku, serta kajian dari pemikir lain yang membahas dan

mengkritisi pandangan-pandangan multikulturalisme tersebut. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai implementasi multikulturalisme dalam masyarakat modern, termasuk tantangan-tantangan praktis yang muncul dalam penerapannya di berbagai negara. Perspektif tambahan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana multikulturalisme berdampak terhadap struktur sosial dan politik, serta bagaimana perbedaan budaya dapat menimbulkan ketimpangan apabila tidak dikelola secara adil dan inklusif (Modood, 2007; Parekh, 2000).

Dalam proses analisis, metode analisis teks diterapkan untuk menggali secara mendalam argumen-argumen yang dikembangkan oleh para pemikir tersebut. Fokus utama diarahkan pada teori-teori yang menghubungkan multikulturalisme dengan prinsip-prinsip keadilan, pengakuan, dan solidaritas antarbudaya. Selain itu, analisis ini juga mengeksplorasi elemen-elemen kunci dalam kritik terhadap ketimpangan sosial dan politik yang sering kali muncul akibat perbedaan budaya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana multikulturalisme dapat ditawarkan sebagai sebuah solusi filosofis dan praksis untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

III. PENUTUP

Multikulturalisme, sebagai konsep filosofis dan sosial, menawarkan tantangan sekaligus peluang besar dalam menghadapi keberagaman budaya di dunia modern. Secara teoritis, multikulturalisme mengajukan pandangan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mampu mengakui serta merayakan perbedaan budaya, dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup secara adil, bebas, dan bermartabat. Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral dalam membangun masyarakat yang inklusif, di mana keberagaman tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama.

Namun demikian, realitas sosial kerap kali tidak sejalan dengan ideal-ideal filosofis tersebut. Ketimpangan sosial, diskriminasi, serta ketegangan antarbudaya masih menjadi persoalan yang terus muncul dalam masyarakat multikultural. Tantangan ini semakin kompleks di tengah arus globalisasi dan mobilitas populasi yang tinggi, yang memunculkan dinamika baru dalam relasi antarbudaya. Oleh karena itu, meskipun multikulturalisme menyajikan visi masyarakat yang harmonis dan adil, implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata membutuhkan upaya yang konsisten dan terkoordinasi dari berbagai sektor masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk disadari bahwa menjembatani antara ideal filosofis dan realitas sosial bukanlah proses yang mudah. Diperlukan komitmen bersama untuk menjalani perjalanan tersebut. Pendidikan multikultural yang komprehensif, kebijakan publik yang inklusif dan menjamin hak-hak budaya kelompok minoritas, serta peran media sebagai ruang dialog yang konstruktif

merupakan beberapa instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Multikulturalisme bukan hanya mengajarkan setiap manusia untuk menghormati perbedaan, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa keberagaman merupakan elemen esensial dalam mewujudkan kemajuan dan kedamaian sosial.

Dengan membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai keadilan dan pengakuan antarbudaya, masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis dapat tercipta, di mana setiap individu dan kelompok dapat hidup berdampingan tanpa rasa takut terhadap diskriminasi atau penindasan. Perlu diakui bahwa proses menuju masyarakat multikultural yang ideal memerlukan waktu, kesabaran, serta upaya berkelanjutan. Tanggung jawab manusia sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat, dan sebagai warga negara adalah untuk senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya menjadi teori yang dibicarakan, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti itulah, tidak hanya membangun masyarakat yang toleran, melainkan juga masyarakat yang saling mendukung, menghargai, dan memperkaya satu sama lain dalam semangat kebersamaan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Addainuri, M. I., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). *Pendidikan agama Islam pluralisme dan multikultural*. Publisher: Alifba Media.
- Alim, T., & Diaz, W. (2024). Antara tradisionalitas dan modernitas: Membangun paradigma kemajuan umat Islam melalui integrasi epistemologi Barat dan Islam, 2(2), 78–89.
- Alim, T., Diaz, W., Arzet, M., & Ramadhan, M. F. (2024). Menggali batasan rasionalitas: Implikasi pemikiran David Hume dalam kehidupan modern. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(8), 4463-4471. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1304>.
- Ambarudin, R. I. (2016). Pendidikan multikultural untuk membangun bangsa yang nasionalis religius. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/civics.v13i1.11075>
- Amsar A. Dulmanan. (2020). Multikulturalisme dan politik identitas: Catatan reflektif atas gagasan politik Will Kymlicka. *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 1(1), 31–43.
- Andra Triyudiana, N. P. S. N. (2023). Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness menurut John Rawls di Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila. *Das*

- Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Basyir, K. (2023). *Menyapa masyarakat madani di Bumi Seribu Pura*. Penerbit: CV. Global Aksara Pers
- Clarke, E. (1969). Philosophical methodology in Will Kymlicka's multicultural citizenship. *Federal Governance*, 5(1).
<https://doi.org/10.24908/fg.v5i1.4402>
- Fatah, A. M., Emha, H. M., & Ismaiayah. (2023). Konflik keagamaan dan toleransi serta tinjauan psikologi agama-nya dalam konteks multikulturalisme. *ARIMA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 224–233.
<https://jurnalistiqomah.org/index.php/arima/article/view/325>
- Harmi, H. (2020). *Pengalaman multikultural agama, etnisitas dan gender*. <http://repository.iaincurup.ac.id/1073/1/PENGALAMAN%20MULTIKULTURAL%20Agama.pdf>
- Haryono, O., Firmansyah, Y., & Repelita, T. (2024). Peran PPKn sebagai pendidikan multikultur dalam meningkatkan toleransi siswa. *Journal of Education Research*, 5(2), 2138–2144.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1095>
- Jurnal, J., & Nusantara, C. (2024). Internalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural RA Az-Zakiyatu Shalehah: Internalization of multicultural educational values for early children through thematic learning at RA Az-. *November*, 6695–6705.
- Kewuel, H. K., Budiyanto, A., Fajar, Y., & Kumoro, N. B. (2017). *Seri kebudayaan I: Pluralisme, multikulturalisme dan batas-batas toleransi*.
- Kymlicka, W. (2015). The essentialist critique of multiculturalism: Theories, policies, ethos. In *Multiculturalism Rethought: Interpretations, Dilemmas and New Directions* (Issue October).
<https://doi.org/10.1515/9781474401890-012>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Zidane, M., Sifa, P. M., & Mawarni, I. D. (2024). Kewarganegaraan dan pengakuan budaya lokal: Tantangan multikulturalisme di era modern Indonesia. *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- Putra, E. A., Khairiah, A. S., Rahman, A., Taskiyah, E., Aqmar, F. R., & Kamila, S. (2024). Peran media dalam meningkatkan komunikasi antar budaya pemahaman, 4, 1–10.
- Ramedlon, R., Warsah, I., Amin, A.-F., Adisel, A., & Suparno, S. (2021). Gagasan

dasar dan pemikiran multikulturalisme. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 181–189.
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.3152>

Sapetra Siburian, E., Sinurat, A., & Haloho, B. (2023). Multikulturalisme masyarakat di Kota Pematangsiantar: Suku, agama dan budaya. *Jurnal Pendidikan Mandal*, 8(1), 274–281.
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index>

Setyaningsih, W. (2021). Implementasi pendekatan multikultural dalam upaya meningkatkan kesadaran kebhinekaan menuju masyarakat madani. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i1.4647>

Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I. M., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*, 254.

Susetyo, D. P. (2017). *Revitalisasi toleransi beragama berbasis kearifan lokal*.

Syahid, A., & Mashuri, S. (2023). Moderasi beragam pada masyarakat multietnik dan transmigrasi. In *Literasi Nusantara Abadi Grup*.

Tuasikal, P., & Safitri, A. (2024). Tantangan dan solusi dalam mengelola keberagaman dan inklusi di tempat kerja: Membangun lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 3858–3870. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>

Vera Dwi Apriliani, G. S., & Acep, M. E. (2023). Menghargai perbedaan: Membangun masyarakat multikultural. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(2), 425–432.